

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMKAB
SUMENEP (Periode 2009-2013)**

Astri Furqani¹, Titimmah²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Wiraraja Sumenep
as3oke_dech@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Wiraraja Sumenep

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemkab Sumenep. Sampel dalam penelitian ini menggunakan laporan Realisasi APBD dan data pertumbuhan ekonomi (PDRB) Sumenep dari tahun 2009-2013. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dan model analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pada analisa secara simultan hasilnya variabel independen (pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Modal). (2) analisa secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Keywords: *tax compliance, education level, income level*

PENDAHULUAN

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan kuantitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing (Bastian, 2006 :354). Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada UU No. 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam

menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal diharapkan terjadinya peningkatan pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik. Peningkatan layanan publik ini diharapkan dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk membuka usaha di daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya pemerintah

dengan memberikan berbagai fasilitas untuk investasi. Konsekuensinya, pemerintah perlu memberikan alokasi belanja yang lebih besar untuk tujuan ini.

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja modal. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya keterlibatan dari lembaga legislatif terkadang dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terjadikurang efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat.

Putro (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat tercapai melalui pelaksanaan otonomi daerah karena memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus, mengembangkan, dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi

dalam Pemerintah Daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan peningkatan belanja modal, hal tersebut dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah.

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan PAD dan penerimaan PAD yang semakin bertambah diharapkan Kabupaten Sumenep dapat meningkatkan investasi dan alokasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang semakin baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemkab Sumenep (Periode 2009-2013)”**.

Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemkab Sumenep?

- 2) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemkab Sumenep?
- 3) Apakah berpengaruh pertumbuhan ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemkab Sumenep?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

- 1) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemkab Sumenep.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemkab Sumenep.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemkab Sumenep.

TINJAUAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat,

meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Abdul Halim (2001:94), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Menurut Abdul Halim (2001:96), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Menurut Mardiasmo (2004) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran mempunyai tiga tahapan:

1. Perumusan proposal anggaran
2. Pengesahan proposal anggaran
3. Pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum.

Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah.

Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua (Mardiasmo, 2004) :

1. Anggaran operasional, merupakan anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran yang termasuk operasional antara lain belanja umum, belanja operasi dan belanja pemeliharaan.
2. Anggaran modal, merupakan anggaran yang menunjukkan anggaran jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya

melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti perlatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran berbasis kas mengklasifikasikan belanja modal dalam enam kelompok:

1. Belanja tanah
2. Belanja peralatan mesin
3. Belanja gedung dan bangunan
4. Belanja jalan, irigasi, dan jaringan
5. Belanja aset tetap lainnya
6. Belanja aset lainnya

Hipotesis

H_{o1} = tidakada pengaruh positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

H_{a1} = ada pengaruh positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

H_{o2} = tidakada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

H_{a2} = ada pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

H_{o3} = tidakada pengaruh positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

H_{a3} = ada pengaruh positif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

- 1) Diduga terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
- 2) Diduga terdapat pengaruh positif antara pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
- 3) Diduga terdapat pengaruh positif antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

METODE PENELITIAN

Jenis dan objek Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif, Objek penelitiannya adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA), Jalan Kamboja No.29 Sumenep.

Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan realisasi APBD dan data pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Sumenep. Sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

Purposive Sampling, dengan kriteria sebagai berikut :

1. Laporan relisasi APBD tahun 2009-2013, dapat diperoleh data mengenai jumlah anggaran belanja modal dan pendapatan asli daerah.
2. Data pertumbuhan ekonomi (PDRB) tahun 2009-2013 yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS).

Sumber data

Sumber data yang di ambil dalam penelitiann ini yaitu sumber data primer, Yaitu sumber data yang langsung diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) meliputi Laporan Realisasi APBD (data mengenai jumlah anggaran belanja modal dan Pendapatan Asli daerah dari Tahun 2009-2013) dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu data pertumbuhan ekonomi (PDRB) dari Tahun 2009-2013.

Variabel Independen

1. Pertumbuhan Ekonomi (Variabel X_1)

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita dalam jangka panjang.

(Indikator X_1) yang mendekati meliputi: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, yang dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{(\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1})}{(\text{PDRBt-1})} \times 100\%$$

2. **Pendapatan Asli Daerah (Variabel X₂).**

Indikator X₂ yang mendekati meliputi:

- 1) Hasil Pajak Daerah (HPD)
- 2) Retribusi daerah (RD)
- 3) Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD)
- 4) Lain-lain Pendapatan yang disahkan (LPS) dan Lain-lain

$$\text{Rumus} = \text{HPD} + \text{RD} + \text{PLPD} + \text{LPS}$$

Variabel Dependen

Variabel terikat dari penelitian ini adalah Belanja Modal (Variabel Y). Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (**Indikator Y**) yang mendekati meliputi :

- 1) Belanja tanah
- 2) Belanja peralatan dan mesin
- 3) Belanja gedung dan bangunan
- 4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan
- 5) Belanja aset tetap lainnya.

Teknik Analisis Data

Pengelolaan menggunakan SPSS versi 20.

Analisis Kuantitatif-Deskriptif

Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka-angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan dalam suatu bentuk uraian (dideskriptifkan).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov - Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

Jika besarnya nilai Kolmogorov Smirnov < 0,05 maka data residual berdistribusi normal. Selain menggunakan Kolmogorov Smirnov uji normalitas dapat juga di uji dengan menggunakan uji analisis statistik dengan melihat nilai kurtosis dan Skewness dari residual. Nilai z statistik untuk Skewness dan Kurtosis dapat dihitung dengan rumus:

$$Z_{\text{skewness}} = \frac{\text{skewness}}{\frac{\sqrt{6}}{N}}$$

$$Z_{\text{kurtosis}} = \frac{\text{kurtosis}}{\frac{\sqrt{24}}{N}}$$

Dimana N adalah jumlah sampel , jika nilai Z hitung > Z tabel maka distribusi tidak normal.

Tabel

Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-0,0000385
	Std. Deviation	1,03E+10
Most Extreme Differences	Absolute	0,226
	Positive	0,14
	Negative	-0,226
Kolmogorov-Smirnov Z		0,506
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,96

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: output uji Asumsi Klasik dengan SPSS 20 (diolah)

Uji Multikolinearitas

Ghozali (2006) menjelaskan bahwa pengujian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). apabila nilai koefisien $VIF > 0,05$ (5%) berarti terjadi multikolinearitas, sebaliknya apabila nilai koefisien $VIF < 0,05$ (5%) dan nilai toleransi di atas 0,1 berarti data bebas multikolinearitas.

$$VIF = \frac{1}{(1 - r_{ij}^2)}$$

Dimana:

VIF = *Variance inflation Factor*

R_{ij} = Besarnya korelasi antara variabel i dengan variabel j

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson (D-W), dengan tingkat = 5% , maka rumus yang digunakan yaitu :

1. Menentukan hipotesis nol dan alternatifnya.
2. Menghitung besarnya nilai statistik DW dengan rumus : $d = \frac{\sum(et - (et - l))^2}{\sum e^2 t}$
3. Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan ketentuan tidak terjadi autokorelasi antar variabel bebas terhadap variabel terikat, jika koefisien DB berada diantara -2 hingga +2.

Uji Heterokedastisitas

Penyimpangan terhadap faktor pengganggu disebut heteroskedastisitas (*heteroscedasticity*). Uji terhadap ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah

diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi -Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Selain menggunakan grafik plot uji heteroskedastisitas dapat juga di uji dengan menggunakan uji korelasi Rank Spearman dengan menggunakan rumus :

$$rs = \frac{6 \sum_{i=1}^n d^2 j}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana :

d = menunjukkan perebedaan setiap pasang rank

n = menunjukkan jumlah

Bila r_s mendekati $\pm$ maka kemungkinan besar terdapat heteroskedastisitas dalam model itu, sedangkan bila r_s mendekati 0 maka kemungkinan adanya heteroskedastisitas (Firdaus,2004:106).

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda biasanya digunakan untuk mendeteksi dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat. Sedangkan dalam penelitian terdapat dua variabel dependen, maka satu persatu di masukkan dalam persamaan regresi berganda. Adapun persamaan regresinya ialah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 PAD + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = konstanta

$\beta_{1,2}$ = koefisien regresi

PE = Pertumbuhan Ekonomi

PAD = Pendapatan Asli daerah

e = koefisien eror

Uji Statistik F (f-test)

Untuk menguji signifikan atau tidaknya secara simultan digunakan uji f, dengan rumus :

$$F_o = \frac{R^2/k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Dimana :

R = koefisien korelasi berganda

n = jumlah sampel

k = jumlah variabel bebas

untuk uji hipotensis dengan uji distribusi f sebagai berikut :

Ho = tidak ada hubungan antara variabel terkait dengan variabel bebas.

Hi = ada hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

F hitung > F table ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

F hitung < F table tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Uji Statistik T (t-test)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen dengan rumus :

$$th = \frac{b}{sb}$$

Dimana :

th = besarnya t hitung

b = parameter estimasi dari X

sb = standar error dari X

untuk uji hipotensis dengan uji distribusi t sebagai berikut :

Ho = tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Hi = ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Jika $t_{hitung} > t_{table}$ berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Jika $t_{hitung} < t_{table}$ berarti H_0 diterima H_1 ditolak, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y).

Koefisien Determinan

Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel

independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1 menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Untuk melihat pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja modal dari tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel

Data Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (X1)	PAD (X2)	Belanja Modal (Y)
2009	4,44%	44.292.310.517,31	148.315.173.556,75
2010	5,64%	46.702.756.751,92	93.227.959.695,00
2011	6,24%	57.940.353.705,10	132.179.249.804,47
2012	6,33%	85.886.851.769,04	194.361.188.002,77
2013	6,44%	97.052.073.113,06	221.374.320.440,64

Sumber : Data diolah Peneliti

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat tingkat kenaikan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja modal.

1. Pertumbuhan ekonomi di Pemkab Sumenep secara umum mengalami peningkatan. PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,44%. Hal ini disebabkan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

2. Pendapatan Asli daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2013 sebesar Rp. 97.052.073.113,06. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini akibat perkembangan pesat pajak daerah dan retribusi daerah.

3. Belanja modal tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 221.374.320.440,64. Sedangkan belanja modal terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu Rp. 93.227.959.695,00.

Uji Korelasi

Tabel
Hasil Uji Korelasi

		X1	X2
Y	Pearson Correlation	,427	,902
	Sig. (2-tailed)	,236	,018
	N	5	5
	N	5	5

Sumber: output uji korelasi dengan SPSS 20 (diolah)

Hipotesis:

▪ $\text{Sig} \leq \alpha$

H0 : tidak terdapat korelasi antara X dan Y

Secara statistik variabel X1 signifikan

H1 : terdapat korelasi antara X dan Y

berkorelasi dengan variabel Y dengan

Tolak H0 jika:

berkorelasi lemah.Sedangkan X2

▪ $\rho_{\text{hit}} > \rho_{\text{tabel}}$ atau

berkorelasi dengan variabel Y dengan
berkorelasi sangat kuat.

Tabel
Kriteria koefisien korelasi

NILAI R	Korelasi
0,0 – 0,29	Sangat lemah
0,3 – 0,49	Lemah
0,5 – 0,69	Cukup
0,7 – 0,79	Kuat
0,8 – 1,00	Sangat kuat

Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hipotesis:

H0: data berdistribusi normal

H1 : data berdistribusi tidak normal

Dengan nilai signifikan 0,960 dapat dikatakan $> 0,05$, maka tidak dapat tolak H0 yang artinya nilai residu terstandarisasi menyebar secara normal sehingga dapat disimpulkan data menyebar secara normal.

Uji Multikolinieritas

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) < 10 dan nilai *Tolerance* < 1 , maka artinya tidak terjadi

multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.Hal tersebut sudah memenuhi prasyarat untuk dilanjutkan pada analisa model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokoUji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson dengan ketentuan tidak terjadi autokorelasi antar variabel bebas terhadap variabel terikat, jika koefisien DB berada diantara -2 hingga +2.Output SPSS yang dihasilkan adalah koefisien DB yang dihasilkan besarnya 1,255 mendekati 2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam

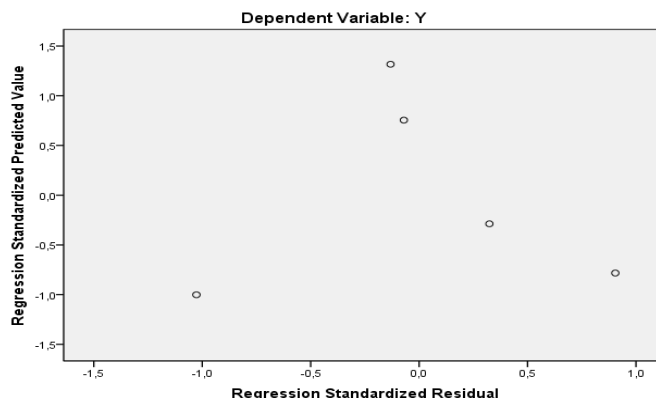
regresi antara variabel bebas X_1 dan X_2 terhadap Y tidak terjadi Autokorelasi.

Uji Heterokedastisitas

Dari gambar dibawah ini, dalam Scatterplot dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang

terlihat serta titik menyebar secara acak diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y , maka dapat dinyatakan tidak terjadi Heterokedastisitas.

Gambar
Uji Heterokedastisitas
Scatterplot



Sumber: output uji Klasik dengan SPSS 20 (diolah)

Pengujian Hipotesis

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Dari uji ANOVA atau F didapat nilai F hitung sebesar 23,301 dengan probabilitas 0,041. Karena probabilitas jauh lebih < dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi belanja modal atau dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal tersebut dapat juga dilihat dari perhitungan SPSS dengan nilai Signifikansi 0,041 dengan kriteria penolakan H_0 jika tingkat Signifikansi < 0,05. Maka dengan Sig. 0,041 menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak.

Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Untuk menguji masing-masing variabel independen secara parsial terhadap belanja modal (variabel dependen) dilakukan dengan menguji nilai t pada tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%. Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independen

Dari kedua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi, ditemukan bahwa variabel X_1 tidak signifikan berpengaruh terhadap Y karena nilai signifikan > 0,05. Sedangkan X_2 signifikan berpengaruh terhadap Y .

Dalam analisis ini digunakan analisis regresi linear berganda dan untuk mengolah data yang ada digunakan alat bantu komputer dengan program SPSS (*Statistic Program For Social Science*) versi 20.0. Berdasarkan hasil analisis diperoleh

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 1,740E11 - 3,524E10X_1 + 2,846X_2$$

Berdasarkan persamaan tersebut diatas, maka dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut :

β_0 = Nilai konstanta sebesar 1,740E11 menunjukkan bahwa apabila jumlah pertumbuhan ekonomi (X1) dan PAD (X2) konstan maka mengalami peningkatan sebesar 1,740E11.

β_1 = -3,524E10 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X1)

berpengaruh negatif, dapat diartikan apabila ada kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen maka belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 3,524E10.

β_2 = 2,846 menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (X2) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila ada kenaikan pendapatan asli daerah maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan sebesar 2,846.

Koefisien Determinasi

Tabel Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,979 ^a	,959	,918	1,45537E10

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Dari nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan besarnya $R = 0,979$ artinya korelasi antar variabel independen dengan variabel dependen sebesar 97,9%. $R\text{-square} = 0,959$ artinya X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan Y sebesar 95,9% selebihnya 4,1% dijelaskan oleh variabel lain dan juga error.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil ANOVA atau uji F diketahui bahwa secara simultan semua variabel independen yang dalam hal ini pertumbuhan ekonomi (X1) dan pendapatan

asli daerah (X2) signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen (belanja modal (Y)) di level 5% (0,05) . Terbukti dengan hasil signifikansinya $0,041 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen secara simultan signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil Uji t, variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal dengan tingkat signifikansi variabel 0,118 ($>0,05$). Berdasarkan program SPSS yang terdapat dalam tabel 4.10 diperoleh tingkat signifikansi 0,118. Nilai tersebut lebih besar dari nilai α (0,05). Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa H_{a1} ditolak atau H_{01} diterima. Dengan diterimanya H_{01} menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal sebagai variabel dependen. Pertumbuhan ekonomi (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal pada Kabupaten Sumenep, pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009-2013 tidak diikuti oleh anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal. Sehingga Pemkab Sumenep harus memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah, mempertimbangkan kondisi sosial politik di daerahnya, dan Pemkab Sumenep harus mengubah komposisi pengalokasian anggaran belanja modalnya.

Sedangkan untuk pengujian secara parsial antara pendapatan asli daerah (X_2) terhadap belanja modal dapat dilihat dari perhitungan SPSS dengan kriteria penolakan H_{02} jika tingkat signifikansi $< 0,05$. Maka dengan nilai signifikansi sebesar $0,025 < 0,05$, dapat dikatakan bahwa H_{02} ditolak. Dengan kata lain bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil SPSS sesuai dengan objek yang ada, dimana pendapatan asli daerah pertahunnya terus meningkat

sehingga Pemerintah memberikan kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat serta dapat meningkatkan investasi dan alokasi belanja modal pemerintah daerah. Maka dapat disimpulkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Hal ini didukung dari nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan besarnya $R = 0,979$ artinya korelasi antar variabel independen dengan variabel dependen sebesar 97,9%. $R\text{-square} = 0,959$ artinya X_1 dan X_2 secara bersama-sama mampu menjelaskan Y sebesar 95,9% selebihnya 4,1% dijelaskan oleh variabel lain dan juga error.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, maka peneliti membuat beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Uji t , variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja modal (Y). Sedangkan pendapatan asli daerah (X_2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal (Y).
2. Hasil analisis data secara simultan menunjukkan bahwa pertumbuhan

ekonomi (X1) dan pendapatan asli daerah (X2) signifikan berpengaruh terhadap belanja modal.

3. Hasil dari nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) hasil analisa regresi secara keseluruhan menunjukkan besarnya $R = 0,979$ artinya korelasi antar variabel independen dengan variabel dependen sebesar 97,9%. $R\text{-square} = 0,959$ artinya X1 dan X2 secara bersama-sama mampu menjelaskan Y sebesar 95,9% selebihnya 4,1% dijelaskan oleh variabel lain dan juga error.

Saran

1. Bagi Pemkab Sumenep diharapkan untuk meningkatkan pengalokasian anggaran belanja modal agar pemerintah mampu untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan daerah yang tercermin dari adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggunakan pendapatan asli daerah dengan sebaik mungkin untuk alokasi belanja modal karena dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal, serta belanja modal yang dilakukan harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik

dan mampu memberikan pendapatan bagi daerah

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur dan variabel yang berbeda, atau populasi penelitian dapat meliputi keseluruhan Pemkab Se-Jawa Timur, agar memperoleh hasil yang lebih baik menggambarkan pangaruh pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

REFERENSI

- Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu. Bengkulu. 4-5 Oktober 2004.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia. 2007. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar, 26-28 Juli 2007.
- Firdaus, Muhammad. 2004. *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress Pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*. Yogyakarta: STIE.
- Halim, Abdul & Abdullah, Syukriy. 2006. *Hubungan dan masalah keagenan*

- di pemerintahan daerah: sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Iskandar, Maolana Amin. 2012. *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, dan kemandirian Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris pada pemerintahan Kabupaten/Kota di Pulau Jawa Periode 2006-2010)*. Salemba: Fakultas Ekonomi Program Eksetensi Akuntansi.
- Jaya, Putu Ngurah Panji Kartika dan Dwirandra. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi*. Bali: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud).
- Jhingan. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT RAJA GRAFINDO PERSADA.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: ANDI.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. *Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)*. JAAI Vol. 8 No. 2, 101-118.
- Purwanto. 2007. *Instrument Penelitian Sosial dan Pendidikan-Pengembangan dan Manfaat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra. 2009. *Definisi Pertumbuhan Ekonomi dan Penjelasannya*. Artikel.
- Putro, Nugroho Suratno. 2010. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 tahun 2010 Fokusmedia
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sianipar, Ronald. "Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional". *Seminar Nasional "Public Sector Scorecard"*. Jakarta, 17-18 April 2002.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suparmoko. 2002. *"Keuangan dan Pembangunan Daerah"*. Ekonomi Publik. Yogyakarta: Andi.
- Syaiful. 2006. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi pemerintahan*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.